



IDAI: Kekerasan pada Anak Sisakan Trauma

Kekerasan di tempat penitipan anak seperti yang terjadi di Yogyakarta terus mendapat perhatian publik. Dampak kekerasan tersebut berisiko meninggalkan trauma bagi korban hingga usia dewasa.

JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan yang dialami anak-anak di masa kecil berpengaruh besar pada tumbuh kembangnya. Kasus kekerasan pada anak seperti yang terjadi di tempat penitipan anak (*daycare*) di Yogyakarta, tidak hanya berupa luka fisik sesaat, tapi juga kerusakan jangka panjang yang memengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka.

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Fitri Hartanto menjelaskan, kekerasan di usia dini bisa menyebabkan kerusakan menetap pada susunan saraf. Hal ini berisiko mengakibatkan retardasi mental, kesulitan belajar, hingga gangguan perkembangan motorik.

"Traumanya bisa mendalam dan berbekas sampai dewasa. Kita tidak ingin anak-anak kita nanti menjadi generasi traumatis disebabkan kekerasan yang dialami pada masa dia dititipkan di *daycare*," ungkap Fitri pada diskusi media yang digelar IDAI secara daring, Rabu (29/4/2026).

Diskusi tersebut merespons kasus tragis kekerasan di *Daycare Little Aresha*, Yogyakarta, terhadap puluhan anak balita. Sebagaimana diberitakan, pekan lalu, Jumat (24/4), Polresta Yogyakarta menggerebek *Daycare Little Aresha* setelah menerima laporan dari mantan karyawannya.

Penyelidikan mengungkapkan, sedikitya 53 anak dari 103 anak yang terdaftar terindikasi mengalami kekerasan fisik dan penelantaran, dengan mayoritas bayi dan anak berusia di

bawah dua tahun, termasuk bayi berusia hingga 3 bulan. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh.

Kekerasan pada usia dini, lanjut Fitri, bisa menyebabkan kerusakan menetap pada susunan saraf anak. Bahkan anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami gangguan perkembangan mental emosional, penurunan skor IQ, hingga gangguan fungsi eksekutif.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma (PTSD) jika tidak di dampingi dengan benar. "Yang ditakutkan adalah ada *post-trauma* atau PTSD. Itu akan terjadi ketika kita lalai, saat anak tidak terdampingi dengan baik. Secara fisik tentu akan mudah terlihat dan itu akan menyebabkan gangguan," tegas Fitri.

Sebagai contoh, jika awalnya bisa jalan lalu berjalan pincang. "Nah, ini kita harus curiga terjadi kekerasan saat kita mengasuh anak di tempat pengasuhan. Jadi, jelas dampak fisik dan dampak psikologisnya," tandas Fitri seraya menegaskan tempat penitipan anak berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak.

Alarm bagi orangtua

Belajar dari kasus kekerasan yang terjadi di tempat penitipan anak Yogyakarta dan daerah lain, Fitri meminta orangtua lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Hal ini sebagai peringatan awal adanya kekerasan.

Beberapa tanda trauma yang

harus diwaspadai meliputi, antara lain, perubahan perilaku drastis, yakni anak menjadi murung, penakut, atau menunjukkan sikap yang berlebihan saat akan dibawa ke tempat penitipan anak.

Selain itu, gejala lain seperti anak kembali mengompol padahal sebelumnya sudah tidak, atau kembali mengisap jempol, atau anak mengalami gangguan tidur seperti mimpi buruk atau ketakutan tidur sendirian.

Gejala lain adalah gejala psikosomatis seperti munculnya demam atau nyeri perut yang tidak ditemukan penyebab fisiknya, tetapi hilang saat anak tidak lagi berada di tempat penitipan anak tersebut.

"Jangan menunggu ada tanda lebam. Upaya orangtua adalah mencermati sebelum anak dibawa ke lingkungan yang belum tentu nyaman baginya," ujar Fitri menambahkan.

Terkait kasus kekerasan pada anak di Yogyakarta yang kini masuk ke ranah hukum, Ketua Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yantarsa menyatakan, IDAI siap memberi dukungan sebagai saksi ahli di pengadilan maupun dalam pendampingan medis. IDAI fokus membantu orangtua melakukan tata laksana pascatrauma untuk memulihkan kondisi psikologis anak.

Piprim juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawal isu perlindungan anak. Ia mendorong semangat "warga jaga warga" di mana orangtua, media, pemerintah, dan tenaga medis saling menguatkan dalam upaya promotif dan pre-

ventif.

"Ayo, kita cegah, cari *daycare* yang betul-betul memenuhi standar dan lebih akrab lagi dengan kondisi anak supaya jika ada masalah, bisa segera dideteksi dan diatasi dengan baik," ujarnya.

Keluarga korban "daycare"

Terkait kasus kekerasan di tempat penitipan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ariefatun Choiri Fauzi menemui para orangtua korban kasus dugaan kekerasan di *Daycare Little Aresha*, Senin (27/4), di Yogyakarta.

"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban. Kasus *daycare* yang tidak berjalan sesuai standar pengasuhan dan perlindungan anak harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang di masa mendatang," ujar Menteri PPPA.

Pada pertemuan itu, Menteri PPPA mendengarkan permintaan para orangtua soal penegakan hukum yang transparan, pendampingan yang utuh dan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban. Aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Menteri PPPA berharap kasus di Yogyakarta menjadi momentum evaluasi nasional, agar seluruh *daycare* di daerah-daerah dapat memenuhi standar layanan dan perlindungan anak serta tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. (SON)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005